



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
*FINANCIAL DISTRESS* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

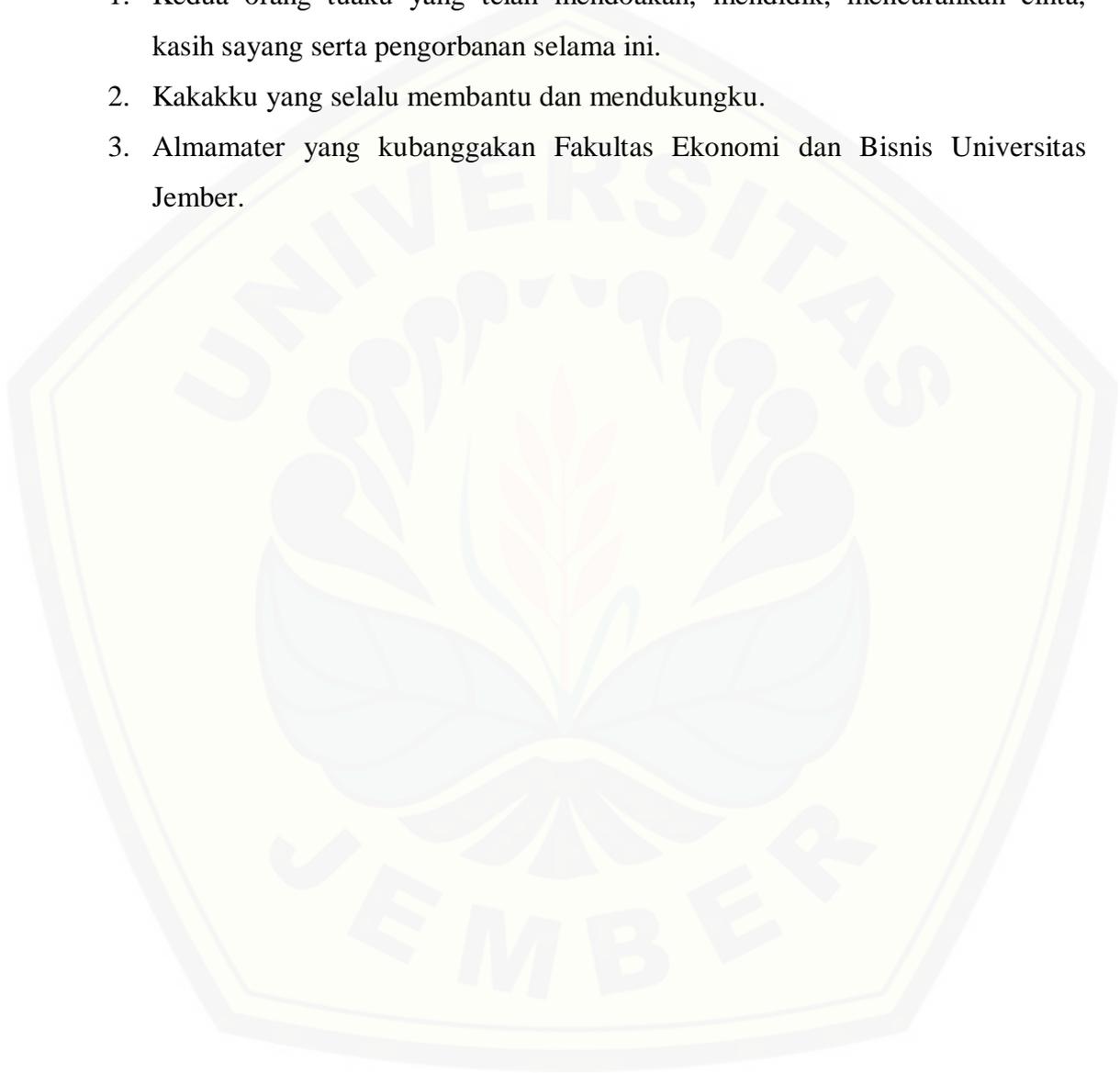
**Wahyu Tri Sulistiawan**  
**160810301147**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

### **PERSEMBAHAN**

Dengan segala doa yang diberikan, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab, dan ungkapan terima kasih penulis kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah mendoakan, mendidik, mencurahkan cinta, kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Kakakku yang selalu membantu dan mendukungku.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



**MOTTO**

*"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi hingga mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada"*

(QS. A1 Haj: 46)



**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Tri Sulistiawan  
NIM : 160810301147  
Jurusan : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap  
*Financial Distress* pada Perusahaan Perbankan di Bursa  
Efek Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember 2018

Yang Menyatakan  
Wahyu Tri Sulistiawan  
160810301147

**SKRIPSI**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
*FINANCIAL DISTRESS* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Oleh

Wahyu Tri Sulistiawan

NIM 160810301147

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia

Nama : Wahyu Tri Sulistiawan

Nim : 160810301147

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Disetujui Tanggal :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 197107271995121001

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.  
NIP. 196608051992012001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.  
NIP. 197809272001121002

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *AUDIT DELAY* PADA  
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahyu Tri Sulistiawan

NIM : 160810301147

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**10 Desember 2018**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

**Ketua** : **Drs. Wasito, M.Si, Ak.** (.....)  
NIP. 19600103 199103 1 001

**Sekretaris** : **Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.** (.....)  
NIP. 19670102 199203 2 002

**Anggota** : **Dr. Whedy Prasetyo, S.E, M.SA, Ak.** (.....)  
NIP. 19770523 200801 1 012



Mengetahui / Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak.  
NIP. 197107271995121001

**ABSTRAK**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
*FINANCIAL DISTRESS* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**WAHYU TRI SULISTIAWAN**

*Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sample menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dari hasil pengolahan Regresi Logistik, diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi para investor dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk melakukan investasi, sekaligus dapat menjadi tambahan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan sehingga mereka dapat berhati-hati sebelum melakukan investasi.

Kata kunci : *Good Corporate Governance, financial distress, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit.*

**ABSTRACT**

***THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE TO FINANCIAL  
DISTRESS ON BANK COMPANIES LISTED IN THE INDONESIAN STOCK  
EXCHANGE***

**WAHYU TRI SULISTIAWAN**

*Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Jember University*

*The purpose of this research is to measure the influence of: institutional ownerships, mangerial ownerships, number of board of directors, independent board of commissioners, and various audit committees on financial distress in companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample selection uses the purposive sampling method. The result is shown that institutional ownership and the number of board of directors have a significant effect on financial distress. While managerial ownership, independent board of commissioners, and the number of audit committees have no significant effect.*

*Keywords : financial distress, good corporate governance, institutional ownerships, mangerial ownerships, number of board of directors, independent board of commissioners, and audit committee*

## PRAKATA

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, skripsi dengan judul **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA** yang diajukan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Jember telah dapat terselesaikan.

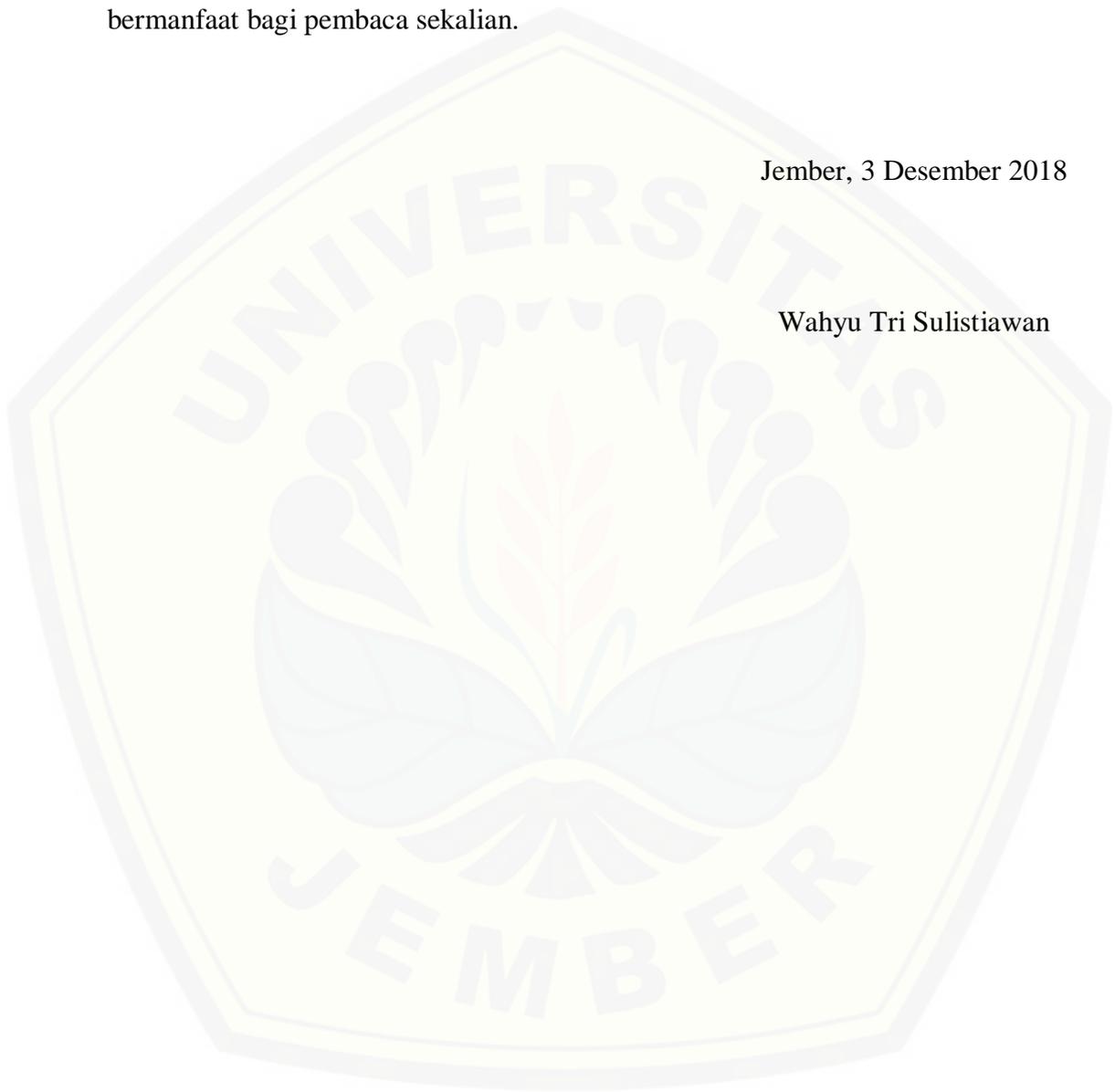
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak. dan Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Wasito, M.Si, Ak., Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak., dan Dr. Whedy Prasetyo, S.E, M.SA, Ak., selaku dosen penguji, terima kasih telah memberikan masukan dan koreksi untuk skripsi ini.
4. Ibu/Bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan, terima kasih atas bimbingannya.
5. Seluruh keluarga terutama kepada orang tua terima kasih atas dukungan dan semangatnya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap kawan-kawan akuntansi rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, semoga skripsi ini dapat menambah bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 3 Desember 2018

Wahyu Tri Sulistiawan



**DAFTAR ISI**

LAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Agensi.....	10
2.1.2 <i>Financial Distress</i> .....	12
2.1.3 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	14
2.1.4 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	16
2.1.5 Kepemilikan Institusional.....	17
2.1.6 Kepemilikan Manajerial.....	19
2.1.7 Dewan Direksi.....	19
2.1.8 Komisaris Independen.....	21
2.1.9 Komite Audit.....	22

2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	22
2.3	Kerangka Konseptual Penelitian .....	27
2.4	Pengembangan Hipotesis .....	30
2.4.1	Kepemilikan Institusional dan <i>Financial Distress</i> .....	30
2.4.2	Kepemilikan Manajerial dan <i>Financial Distress</i> .....	30
2.4.3	Jumlah Dewan Direksi dan <i>Financial Distress</i> .....	31
2.4.4	Dewan Komisaris Independen dan <i>Financial Distress</i> .....	32
2.4.5	Komite Audit dan <i>Financial Distress</i> .....	33
BAB 3 METODE PENELITIAN .....		34
3.1	Rancangan Penelitian .....	34
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	34
3.3	Populasi dan Sampel .....	35
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	36
3.5	Metode Analisis Data .....	38
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	38
3.5.2	Regresi Logistik .....	38
3.5.3	Menilai Kelayakan Model Regresi .....	39
3.5.4	Menilai Model Fit.....	39
3.5.5	Uji Wald.....	40
3.6	Kerangka Pemecahan Masalah .....	40
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....		42
4.1	Hasil Penelitian .....	42
4.1.1	Gambaran Umum Sampel Penelitian.....	42
4.1.2	Statistik Deskriptif .....	43
4.2	Analisis Data .....	46
4.2.1	Hasil Analisis Regresi Logistik .....	46
4.3	Pembahasan .....	49
4.3.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Financial Distress</i> .....	50
4.3.2	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Financial Distress</i> .....	52

4.3.3	Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap <i>Financial Distress</i> .....	54
4.3.4	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Financial Distress</i> .....	57
4.3.5	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i> ...	59
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....		63
5.1	Kesimpulan .....	63
5.2	Keterbatasan.....	64
5.3	Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Konseptual .....	29
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	41



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Proses Seleksi Sampel dengan Kreteria .....	42
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.....	43
4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Jumlah Dewan Direksi ...	45
4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian <i>Financial Distress</i> .....	45
4.5 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Logistik .....	46

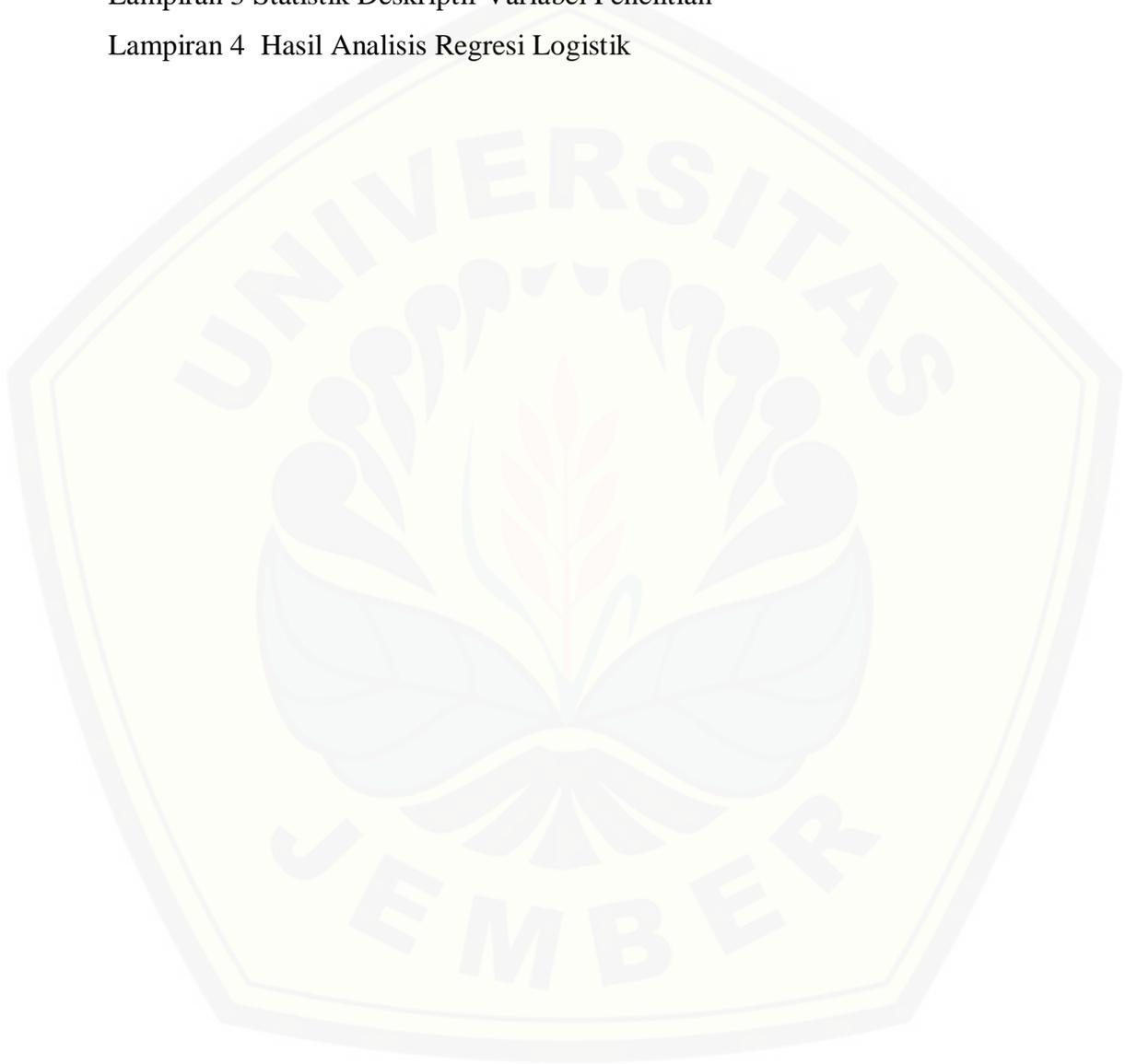
**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

Lampiran 2 Rekapitulasi Data Penelitian

Lampiran 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Logistik



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi global menuntut perusahaan untuk mampu menciptakan daya saing. Daya saing perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu, seperti efiseinsi dan hasil kerja yang optimal. Lemahnya daya saing perusahaan akan memicu potensi kebangkrutan usaha yang diawali oleh adanya masalah kesulitan keuangan (*financial distress*). Kondisi tersebut, dinilai sangat merugikan perusahaan apalagi jika perusahaan tersebut sampai menutup usahanya. Fenomena kesulitan keuangan yang berdampak pada kinerja perusahaan yang buruk juga terjadi di perusahaan yang tercatat di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. BEI pada kurun waktu 2015 telah mengeluarkan (*delisting*) 15 saham perusahaan ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)). Proses *delisting* tersebut merupakan peringatan awal dari otoritas BEI agar dapat dilakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut sebelum terjadi kebangkrutan.

*Financial distress* merupakan kondisi suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi mengalami kebangkrutan usaha. Sebagaimana pendapat Fahmi (2013:158) bahwa *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dinilai tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain mengalami *insolvensi*. Hal ini dikarenakan arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki perusahaan, akan menyebabkan semakin besarnya risiko terjadinya *financial distress*.

Para *stakeholder's* diantaranya manajemen, pemegang saham, investor, kreditur, pemerintah, auditor dalam proses pengambilan keputusan tentunya merupakan pihak yang sangat berkepentingan terhadap informasi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan. Kesalahan dalam memprediksi kelangsungan

operasi perusahaan dapat mengakibatkan kepercayaan investor. Potensi kebangkrutan perusahaan dapat dinilai dari kinerja perusahaan yang tercermin melalui laporan keuangan perusahaan. Munawir (2014:5) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menjadi alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan perusahaan dapat menjadi sumber informasi bagi pemilik (*stakeholders*) mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya. Dari laporan keuangan perusahaan dapat dibuat suatu model yang dapat memprediksi *financial distress* yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan variabel non keuangan seperti kondisi ekonomi, opini audit, terhadap laporan keuangan.

Penilaian mengenai *financial distress* dapat dilakukan dengan melihat tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Hamdani (2016:20) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pengaturan hubungan institusional untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. GCG diterapkan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders*. GCG bertujuan memberikan kemajuan terhadap kinerja perusahaan seperti serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham. Bank Dunia menyimpulkan bahwa GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian pertanggungjawaban kepada investor, dengan tujuan menciptakan *check and balances* untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin pertumbuhan perusahaan. Adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan inilah yang mendorong adanya GCG. Hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen

& Meckling, 1976). Pemegang saham sebagai *principal* berpandangan bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan dan seringkali terjadi perbedaan kepentingan, dimana pengelola (manajer) bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*. Masalah keagenan dipicu oleh adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer dan pemegang saham, dimana manajer cenderung mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*). Hal ini bisa terjadi sebagai dampak dari asimetri informasi (*asymmetric information*) yaitu manajer beranggapan memiliki informasi tentang kondisi perusahaan yang lebih banyak daripada pemegang saham. Kondisi tersebut, dapat diminimalisir dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang dapat menjadi alat motivasi bagi manajer dalam memaksimalkan nilai pemegang saham. GCG selain mampu meminimalisir masalah keagenan antara pemilik dan manajer juga dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi dan *financial distress*.

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen agar tercipta keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan (Hamdani, 2016:21). Adanya *corporate governance* dinilai dapat mengatasi permasalahan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang berdampak pada munculnya biaya keagenan dan berpotensi menurunkan nilai perusahaan. Mengacu pada uraian tersebut, dapat diperoleh ilustrasi bahwa *corporate governance* dinilai bermanfaat dalam memprediksi *financial distress*. Dalam *corporate governance* terdapat mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dapat menjamin aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan arah yang disepakati. Dewan komisaris berperan sebagai fungsi pengawasan atas implementasi kebijakan direksi. Salah satu tugas dewan komisaris adalah memastikan perusahaan melaksanakan GCG, sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer. Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan efektivitas *monitoring* perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan tersebut akan mengurangi terjadinya masalah keagenan karena pemegang saham institusional akan mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit juga mempunyai peran dalam membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, memastikan sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku serta temuan hasil audit dilaksanakan oleh pihak manajemen.

Kajian empiris mengenai pengaruh GCG terhadap *financial distress* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Kusanti dan Andayani (2015) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa hanya jumlah dewan direksi yang berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Temuan yang berbeda, diperoleh penelitian Revina, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen, latar belakang pendidikan komite audit, kualitas audit berpengaruh negatif pada *financial distress*. Hasil penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap *financial distress* yang dilakukan oleh Hanifah dan Purwanto (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, dan *operating capacity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Penelitian Fathonah (2016) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Hasil penelitian Sastriana dan Fuad (2013) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*, sedangkan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan (*firm size*) tidak

berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Fadhilah dan Syafruddin (2013) memperoleh temuan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, biaya agensi manajerial, opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*, sedangkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Radifan dan Yuyetta (2015) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, jumlah ahli keuangan dalam komite audit, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress*, sedangkan kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian Riadiani dan Wahyudin (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress*, tetapi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Hasil penelitian Fathonah (2016) bahwa kepemilikan manajerial, *current ratio*, *return on asset*, dan *current liabilities to total asset* berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komposisi dewan komisaris independen, jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Haq dan Rikumahu (2016) memperoleh temuan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap prediksi *financial distress*. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*. Temuan penelitian Anjana (2017) Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik, Dewan direksi, Komite audit, Dewan komisaris, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Barus dan Widiastuti (2017) menyatakan bahwa Komisaris independen, biaya agensi manajerial, dan *leverage* berpengaruh terhadap *financial distress*. Kepemilikan manajerial, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Ananto dkk. (2017) memperoleh temuan *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan kepemilikan institusional,

ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian Harahap (2017) menyatakan Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan *firm size* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*.

Helena dan Saifi (2018) memperoleh temuan Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Distress*. Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Financial Distress*. Hasil penelitian Munawar dkk. (2018) bahwa kepemilikan institusional dan manajerial, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Namun, penelitian Rahayu dan Sopian (2017) yang mengkaji pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress*. Hasil penelitian menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*.

Perusahaan perbankan merupakan industri yang syarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana (Kasmir, 2014:93). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan aktivitasnya perbankan harus mempunyai integritas tinggi karena menyangkut kepercayaan masyarakat (Taswan, 2015:165). Tingkat kepercayaan masyarakat sangat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan di Indonesia, dimana dana masyarakat yang dapat dihimpun melalui tabungan dan deposito merupakan dana tambahan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta mampu bertahan dipersaingan global. Kinerja keuangan perbankan dituntut untuk selalu dalam kondisi sehat, sehingga potensi sekecil apapun atas terjadinya *financial distress*

harus dapat dideteksi secara baik. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian sektor perbankan adalah perlunya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Bank memiliki batasan berkaitan dengan kredit macet, yaitu mengacu Peraturan Bank Indonesia PBI No 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah yang menyatakan bahwa rasio *Non Performing Loan* (NPL) total kredit bank secara bruto (gross) < 5% dan rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (gross) < 5%. Apabila persentase kredit macet yang dialami bank membesar maka akan menyebabkan kondisi kesehatan bank memburuk. NPL merupakan masalah perbankan yang masuk dalam kategori *credit risk* yang dapat berdampak pada kinerja keuangan perbankan. NPL yang semakin besar akan mendorong beban modal bank semakin berat dan hal ini merupakan peringatan dini terjadinya potensi *financial distress*. Manajemen bank harus mampu mengelola kredit macet, sehingga dapat mengantisipasi kondisi keuangan yang memburuk sebagai dampak dari kredit macet.

Berkaitan dengan *corporate governance*, sektor perbankan memiliki mekanisme yang lebih ketat dibandingkan dengan sektor nonkeuangan dikarenakan bisnis utama sektor perbankan berkaitan dengan keamanan investasi (Hanggraeni, 2016:100). Wujud dari Arsitektur Perbankan Indonesia adalah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dijalankan perbankan dengan membuka akses informasi publik dengan menggunakan berbagai macam media antara lain website, laporan tahunan, laporan kinerja operasional dan sebagainya. Sehingga, penerapan mekanisme *corporate governance* perlu dilakukan secara intensif.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress*. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu penelitian ini hanya fokus pada faktor *good corporate governance*, serta perbedaan populasi dan periode penelitian. Jika populasi peneliti sebelumnya adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013, maka populasi penelitian ini

adalah pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji pengaruh *good corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan direksi terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yaitu bagi peneliti dan bagi akademisi dan bagi pihak investor.

1. Bagi Peneliti dan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan terhadap penelitian-penelitian serupa yang berhubungan dengan *good corporate governance* dalam kaitanya dengan *financial distress* serta diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi para investor dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk melakukan investasi, sekaligus dapat menjadi tambahan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan sehingga mereka dapat berhati-hati sebelum melakukan investasi.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu bentuk hubungan antara *principal* dan *agent*, yang didalamnya *agent* melakukan pelayanan bagi kepentingan *principal* dan pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari *principal* kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen dan pengendalian perusahaan dalam perekonomian modern semakin terpisah dari kepemilikan dimana manager bertanggungjawab terhadap pemilik yang kemudian berimbas dengan pendanaan perusahaan baik dari investor atau kreditor.

Adanya hubungan keagenan menjadi dasar dalam memahami *corporate governance*. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Teori keagenan (*agency theory*) berasumsi bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Hal ini terjadi ketika agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016:30). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Dimungkinkan pengelola bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*).

Konflik kepentingan (*conflict interest*) terjadi sebagai dampak adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang *principal* dan *agent* yang berbeda. *Principal* dan *agent* saling membutuhkan, namun dalam pelaksanaannya dapat terjadi pertentangan kepentingan. *Principal* selaku pemilik modal mempunyai hak akses mengenai informasi internal perusahaan. Disisi lain, *agent* selaku pihak yang menjalankan operasional perusahaan memiliki informasi riil tentang operasi dan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut, berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) meliputi (Hanggraeni, 2016:65):

1. *Moral Hazard*, yang merupakan munculnya permasalahan sebagai akibat *agent* yang tidak melaksanakan hal-hal yang menjadi kesepakatan dengan *principal*.
2. *Adverse selection*, yang merupakan masalah kelalaian tugas, dimana *principal* tidak mengetahui secara pasti informasi apa yang menjadi dasar *agent* mengambil sebuah keputusan atau kebijakan.

Pemisahan pengendalian perusahaan antara *principal* dan *agent* bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola perusahaan. Penguasaan kendali perusahaan dipegang oleh *agent* sehingga *agent* dituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaan di bawah *principal*. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan mengajukan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu (Baridwan, 2013:17).

Setidaknya terdapat dua aspek penting yang dapat dijadikan pihak eksternal perusahaan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan yaitu laba dan arus kas perusahaan. Jika laba yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dilihat bahwa perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Selain itu, dapat dilihat juga dari nilai arus kas yang diperoleh perusahaan. Jika arus kas yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka perusahaan dinilai dapat melakukan pengembalian atas kredit yang diberikan oleh pihak kreditor. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan akan semakin kuat dan perusahaan pun akan mendapatkan kredit dengan mudah dalam setiap kegiatan operasinya.

Sebaliknya, jika nilai laba dan arus kas suatu perusahaan bernilai kecil dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dilihat dari nilai tersebut bahwa pihak eksternal akan menganggap perusahaan tidak mampu dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami permasalahan keuangan atau kondisi *financial distress*.

Hal ini menjadikan pihak eksternal tidak akan mempercayakan dananya untuk dikelola dalam kegiatan perusahaan tersebut.

Kondisi *financial distress* tergambar dari ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Laju arus kas dan besarnya laba sangat berhubungan dengan kondisi *financial distress* (Fahmi, 2013:127). Didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, dari adanya laporan keuangan yang buruk dalam pelaporan laba dan arus kasnya, hal ini dapat menunjukkan kondisi *financial distress*. Kondisi tersebut dapat menciptakan keraguan dari pihak investor dan kreditor untuk memberikan dananya karena tidak adanya kepastian atas *return* dana yang telah diberikan.

### 2.1.2 *Financial Distress*

*Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis dan terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Rodoni dan Ali (2014:174) dalam bukunya memberikan definisi mengenai *financial distress*, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang (*insolvency*) sebagai dampak dari ketidakcukupan jumlah asset yang dahulunya tersedia untuk melunasi kewajiban atau hutang. Pendapat serupa dinyatakan oleh Fahmi (2013:158) bahwa *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.

Kondisi *financial distress* dapat dialami perusahaan sektor apapun dan berpotensi terjadinya kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah dan antisipasi dari manajemen, jika manajemen perusahaan tidak berhati-

hati dalam menghadapi kondisi *financial distress*, maka bisa saja perusahaan masuk pada tahap kebangkrutan. Manajemen dari perusahaan yang mengalami *financial distress* harus melakukan tindakan untuk mengatasi masalah keuangan tersebut dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Terdapat tiga kondisi keuangan yang menyebabkan *financial distress* yang ketiganya saling terkait yaitu faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan modal, besarnya beban utang dan bunga dan menderita kerugian. Oleh karena itu harus dijaga keseimbangannya agar perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan.

Model *financial distress* perlu dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* ditandai dengan adanya arus kas negatif, atau bahkan perusahaan menghentikan operasinya dan perusahaan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi. Prediksi kondisi *financial distress* suatu perusahaan menjadi perhatian banyak pihak, diantaranya:

1. Pemberi pinjaman

Penelitian berkaitan dengan prediksi *financial distress* mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.

2. Investor

Model prediksi *financial distress* dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.

3. Pembuat peraturan

Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. Hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.

#### 4. Pemerintah

Prediksi *financial distress* juga penting bagi pemerintah dan *antitrust regulation*.

#### 5. Auditor

Model prediksi *financial distress* dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian *going concern* suatu perusahaan.

#### 6. Manajemen

Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (*fee* akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan) sehingga dengan adanya model prediksi *financial distress*, diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan.

### 2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Konsep mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik telah berkembang pada dekade 1990-an dan telah dipraktekkan oleh berbagai perusahaan termasuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Corporate governance* dapat dinyatakan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Hanggraeni, 2016:58). Sedangkan *The Indonesian Institute For Corporate Governance* mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara kesinambungan dalam jangka panjang. Struktur adalah susunan atau rangka dasar perusahaan manajemen yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan pemegang saham) dan

*stakholder* lainya dan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan. Sistem adalah prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional yang mendukung dalam suatu perusahaan. Proses adalah kegiatan mengelola dan mengarahkan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme untuk kebaikan dalam perusahaan yang dapat direncanakan untuk mencapai tujuan.

Pelaksanaan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan cerminan keseriusan dari dewan direksi dalam memberikan komitmen terhadap pencapaian tujuan perusahaan. GCG dilaksanakan dengan tujuan menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumberdaya perusahaan dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Melalui GCG akan tercipta persaingan yang sehat serta iklim usaha yang baik. Adapun tujuan dari pelaksanaan GCG adalah (Sutojo dan Aldridge, 2015:5):

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder's* yang bukan pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan direksi dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan dewan direksi dengan manajemen perusahaan.

Penerapan GCG dinilai mampu memberikan manfaat diantaranya (Daniri, 2014:4):

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pengawasan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya.
2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.
3. Mengurangi *agency cost* sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

#### 2.1.4 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan dituntut untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek bisnis dan semua pihak yang menjalankan perusahaan. Prinsip-prinsip utama yang melandasi pelaksanaan GCG meliputi *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* atau biasa disingkat dengan “TARIF”. Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG dapat dinyatakan sebagai berikut (Hamdani, 2016:71):

##### 1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

##### 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### 3. *Responsibility* (Responsibilitas)

*Responsibility* (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

Pada prinsipnya perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini tanggungjawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

### 4. *Independency* (Independen)

Prinsip dasar independensi (*independency*) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

### 5. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Prinsip ini menjamin bahwa setiap keputusan dan

kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### 2.1.5 Kepemilikan Institusional

Brigham & Houston (2014:228) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dunia perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional dapat menjalankan peran sebagai *monitoring agent* yaitu jumlah pemegang saham yang besar mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Adanya pengawasan terhadap manajemen dapat menekan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional dipercaya akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme eksternal yang dapat mencerminkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan dapat mengendalikan masalah keagenan. Fuad (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajer perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, dinilai mampu menghindarkan adanya perilaku oportunistik dari manajer sehingga dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal ini menggambarkan adanya mekanisme kontrol manajemen yang lebih efektif dan akhirnya berdampak terhadap kinerja perusahaan.

Pendekatan keagenan ini menjelaskan tentang tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai

perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

#### **2.1.6 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer turut ambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer bertindak ganda selain sebagai manajer juga sebagai pemegang saham (Brigham & Houston, 2014:211). Adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan dapat mendorong manajemen untuk lebih giat dalam meningkatkan nilai perusahaan untuk kepentingan pemegang saham yang didalamnya termasuk manajemen. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

Salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang meningkat. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (*outsider ownership*), sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

#### **2.1.7 Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan pihak perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan yang keanggotaannya

diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Adapun orang yang dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan di Indonesia tidak secara spesifik ditentukan, namun Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan jumlah anggota dewan direksi minimal satu orang. Jumlah dewan direksi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan yang memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak

independen. Semakin banyak dan kompleks perusahaan, untuk menghasilkan kinerja yang maksimal tentu memerlukan jumlah dewan direksi yang sesuai. Apabila jumlah dewan direksi lebih dari satu, maka peraturan mengenai pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi, serta besar dan jenis penghasilannya ditentukan oleh RUPS yang diwakili oleh dewan komisaris.

### **2.1.8 Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sedarmayanti, 2013:53). Menurut Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) tanggal 1 Juli 2000, perusahaan yang *listed* di BEJ harus mempunyai komisaris independen yang secara proposional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan dewan anggota komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Hasnati, 2014:24).

Komisaris independen suatu perusahaan berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan dan harus bertindak independen dan dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan tertentu. Sebagai bagian dari organ pengawasan, komisaris independen diharapkan memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk itu komisaris independen perusahaan merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi. Komisaris sebagai inti *Corporate Governance* ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, dalam hal ini komisaris independen bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

### **2.1.9 Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Hasnati, 2014:8). Tugas komite audit adalah memastikan efektivitas sistem pengendalian intern serta membantu dewan komisaris melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Perwujudan pelaksanaan tugas komite audit berupa pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi.

Secara garis besar tanggungjawab komite audit mencakup penelaahan (*review*) atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu keberadaan Komite Audit terkait dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum. Komite Audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*, karena dalam menelaah laporan keuangan mereka juga diikutsertakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi.

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) mengenai pengaruh struktur *corporate governance* dan *financial indicators* terhadap kondisi *financial distress*.

Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2009-2011. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, dan *operating capacity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

Sastriana dan Fuad (2013) meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance* dan *Firm Size* terhadap Perusahaan yang Mengalami Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*). Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan kecuali industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2012 sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menyatakan jumlah dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*, sedangkan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan (*firm size*) tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

Fadhilah dan Syafruddin (2013) dalam penelitian tentang Analisis Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Kemungkinan *Financial Distress*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyatakan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, biaya agensi manajerial, opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*. Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kusanti dan Andayani (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Rasio Keuangan terhadap *financial distress*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dan *operating capacity* berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Revina, dkk. (2015) melakukan penelitian mengenai Mekanisme Internal dan *Eksternal Corporate Governance* dalam Memitigasi *Financial distress* pada Industri Transportasi di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI selama periode 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa Komisaris independen, latar belakang pendidikan komite audit, kualitas audit berpengaruh negatif pada *financial distress*

Penelitian Radifan dan Yuyetta (2015) mengenai Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kemungkinan *Financial Distress*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, jumlah ahli keuangan dalam komite audit, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress*. Kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan Riadiani dan Wahyudin (2015) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dengan *Financial Distress* sebagai *Intervening*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang menjadi objek penelitian melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs perusahaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Setelah dimediasi oleh *financial distress*. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress*, tetapi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Fathonah (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Raslo Keuangan terhadap Financial Distress (Studi

pada Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam industri perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010- 2013. Hasil penelitian menyatakan Kepemilikan manajerial, *current ratio*, *return on asset*, dan *current liabilities to total asset* berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komposisi dewan komisaris independen, jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*

Penelitian Fathonah (2016) tentang Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Financial Distress. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam industri perusahaan Property, 143 Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Hasil penelitian menyatakan Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Haq dan Rikumahu (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Karakteristik Praktik *Corporate Governance* terhadap Prediksi *Financial Distress* (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009 – 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan subsector batubara yang terdaftar di BEI periode tahun 2009 sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap prediksi *financial distress*. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*.

Penelitian Anjana (2017) mengenai Pengaruh Kepemilikan Institutional Kepemilikan Publik, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris, Likuiditas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan terhadap *Financial Distress*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institutional, kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit, dewan komisaris,

likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi *financial distress*.

Barus dan Widiastuti (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisararis independen, biaya agensi manajerial, dan *leverage* berpengaruh terhadap *financial distress*. Kepemilikan manajerial, komisararis independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Rahayu dan Sopian (2017) menguji Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap *financial distress* (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2015. Rasio yang digunakan sebagai alat analisis adalah rasio likuiditas, *leverage*, pertumbuhan (*sales growth*), dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan likuiditas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan secara parsial likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*. *Sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Ananto dkk. (2017) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan *Leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisararis, ukuran dewan direksi, ukuran dewan

komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Harahap (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan *Firm Size* Terhadap Kondisi *Financial Distress* pada Perusahaan *Property And Real Estate* Yang Terdaftar di Bei Tahun 2010-2014. Populasi yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar (*listed*) di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan *firm size* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Helena dan Saifi (2018) mengenai Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*. Proporsi komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Munawar dkk. (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* (Studi pada Perusahaan Subsektor Tekstil & Garmen di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional dan manajerial, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Adanya hasil penelitian yang berbeda-beda dalam penelitian-penelitian sebelumnya memberikan motivasi kepada peneliti untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *financial distress*. Berikut ini disajikan secara ringkas penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis.

### **2.3 Kerangka Konseptual Penelitian**

Kesulitan keuangan terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan

yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai keperluan (Brigham dan Houston, 2014:183). *Financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.

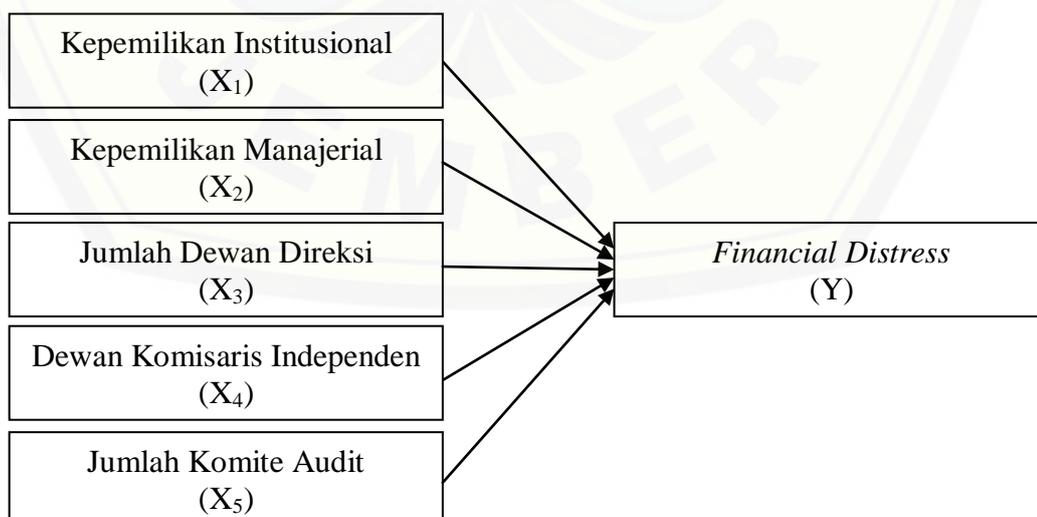
Kondisi *financial distress* berpotensi terjadi sebagai akibat dari *agency problem* (konflik keagenan) dimana direksi selaku *agent* bertindak dan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal*. Hal ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan hubungan antara *principal* dan *agent*, dalam hal ini *agent* melakukan pelayanan bagi kepentingan *principal* dan pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari *principal* kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Konflik kepentingan yang terjadi ini, muncul dikarenakan adanya pemisahan kepengurusan suatu perusahaan dari pemilik perusahaan. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan kecenderungan salah satu pihak (*agent*) untuk melakukan tindakan yang menyimpang dan tidak semestinya, untuk meningkatkan kesejahteraan pihaknya sendiri. Konflik keagenan dapat memicu biaya keagenan (*agency cost*) yang pada akhirnya berdampak pada potensi *financial distress*. Salah satu upaya untuk meminimalisir potensi *financial distress* adalah dengan menerapkan mekanisme *corporate governance*.

Menurut Hanggraeni (2016:60) *corporate governance* bertujuan untuk memastikan bahwa manajer perusahaan selalu mengambil tindakan yang tepat dan tidak mementingkan diri sendiri, serta bertujuan untuk melindungi *stakeholders* perusahaan. Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik akan meminimalkan risiko perusahaan mengalami kondisi *financial distress* (kesulitan keuangan). Penerapan *corporate governance* yang kurang baik dapat memperbesar peluang bagi pemegang saham pengendali untuk mentransfer kekayaan perusahaan ke dalam milik sendiri, karena kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan, maka kemungkinan terjadi permasalahan keuangan (*financial distress*) pada perusahaan itu sendiri.

*Good corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Hamdani, 2016:128). Semakin baik penerapan mekanisme *corporate governance* maka perusahaan akan berada pada dalam kondisi monitoring yang baik, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi kecenderungan kondisi *financial distress* pada sebuah perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) menggambarkan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang dimaksudkan selain untuk pemenuhan kepentingan *shareholders*, juga untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan. Penerapan GCG dinilai mampu menghindarkan adanya konflik kepentingan sehingga kesinambungan perusahaan dapat terjaga. Adanya komitmen yang baik dalam pengelolaan perusahaan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan *shareholders* melalui peningkatan nilai perusahaan yang tercermin melalui peningkatan laba. Kondisi tersebut, menggambarkan pelaksanaan GCG dalam perusahaan berkaitan erat dengan pencapaian kinerja perusahaan yang lebih baik, yang artinya perusahaan akan terhindar dari masalah *financial distress*.

Berdasarkan telaah teoritis di atas, maka penulis menyusun model penelitian atau kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang masalah, landasan teori dan tinjauan penelitian sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan penelitian berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit terhadap *financial distress*. Penjelasan mengenai hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

### 2.4.1 Kepemilikan Institusional dan *Financial Distress*

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi masalah konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer sebagaimana dinyatakan dalam teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Investor institusional akan memonitor tindak manajemen laba yang dilakukan manajer. Melalui proses monitoring secara efektif, kepemilikan institusional mampu untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengarahkan manajemen kepada tujuan yang ditetapkan. Kondisi tersebut tentunya dapat mengurangi terjadinya resiko kesulitan keuangan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, sehingga potensi kesulitan keuangan dapat diminimalkan. Tingginya kepemilikan institusional yang diharapkan mampu mengurangi tingkat *financial distress*.

Hasil penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*

### 2.4.2 Kepemilikan Manajerial dan *Financial Distress*

Kepemilikan manajerial adalah mekanisme *good corporate governance* yang membantu masalah keagenan (*agency conflict*) kepemilikan manajerial yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan karena adanya

kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan ada pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam konsep teori keagenan menyatakan kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan dan berpengaruh terhadap penurunan biaya perusahaan sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan. Manajer yang juga sekaligus pemegang saham dan manajer yang bertindak sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (*outsider ownership*), sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Peningkatan kepemilikan manajerial akan mampu mendorong turunnya potensi terjadinya kesulitan keuangan. Keadaan tersebut disebabkan karena peningkatan kepemilikan manajerial akan mampu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Fuad, 2013).

Hasil penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*

#### **2.4.3 Jumlah Dewan Direksi dan *Financial Distress***

Direksi merupakan pihak yang paling berpengaruh pada operasi perusahaan. Seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan keputusan dari dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi adalah mekanisme *good corporate governance* yang membantu masalah keagenan (*agency conflict*). Dalam hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976), jumlah dewan direksi yang besar dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat menguntungkan perusahaan tersebut dan

memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Fuad, 2013). Nilai tambah yang dimaksud adalah jumlah dewan direksi yang sesuai dengan besarnya perusahaan akan lebih efektif dalam memonitoring kinerja perusahaan dan terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan. Semakin besar jumlah direksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan akan mengalami tekanan keuangan (*financial distress*) akan semakin kecil.

Hasil penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) serta Kusanti dan Andayani (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress*.

#### **2.4.4 Dewan Komisaris Independen dan *Financial Distress***

Dewan komisaris independen merupakan mekanisme *good corporate governance* yang dapat meminimalisir permasalahan *agency* yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Kondisi ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), melalui fungsi pengawasan (*monitoring*) oleh komisaris independen maka dewan direksi selaku agen akan bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, sehingga mampu bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sedarmayanti, 2013). Komisaris independen berfungsi sebagai penasehat yang memberikan saran dan masukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris independen mampu melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta GCG. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan menjadikan manajer lebih berhati-hati dan transparan dalam menjalankan perusahaan yang akan mendorong terwujudnya GCG. Pengawasan yang baik dari dewan komisaris independen akan memperkecil tingkat *financial distress*.

Peran komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham

melalui fungsi monitoring implementasi kebijakan direksi. Semakin banyak dewan komisaris maka akan dapat menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan (*financial distress*).

Hasil penelitian Revina, dkk. (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress*.

#### 2.4.5 Komite Audit dan *Financial Distress*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Hasnati, 2014:8). Keberadaan komite audit sebagaimana dinyatakan dalam *agency theory* oleh Jensen dan Meckling (1976), memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh, sehingga dapat menekan terjadinya konflik keagenan. Komite audit merupakan mekanisme *good corporate governance* yang dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan karena keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun kedepan.

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi. Adanya pengawasan ini tentunya akan membuat manajemen bertindak hati-hati dalam menjalankan operasional perusahaan. Sehingga, efektifitas komite audit akan meningkatkan kemampuan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit dapat menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami permasalahan keuangan (*financial distress*).

Hasil penelitian Revina, dkk. (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Jumlah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan serangkaian rencana yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian (Arikunto, 2014:203). Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan menganalisis pengaruh komponen *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit sebagai independen variabel terhadap *financial distress* sebagai dependen variabel.

Penulis menggunakan data sekunder dimana data yang diambil dan dikutip dari data yang sudah ada dan tersedia pada objek yang diteliti. Data diukur dengan angka dan diolah dengan prosedur statistik, sehingga diperoleh data baru yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam rangka menjawab hipotesis yang diajukan.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, dimana penulis menggunakan data berupa angka. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan *financial distress*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu merupakan data yang dapat diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2016:147). Penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2015 sampai tahun 2017 yang bisa dilihat dalam *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) yang diterbitkan BEI, Pojok BEI Universitas Jember, dari situs masing-masing perusahaan sampel, maupun dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek/subjek dengan karakteristik tertentu yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulan (Sugiyono 2015:114). Penulis menjadikan perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017 sebagai populasi penelitian kajian sampel perbankan dalam penelitian sebagaimana merujuk pada peraturan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/ POJK. 03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (yang inti dari peraturan tersebut adalah tidak ada lagi kerahasiaan bank). Dari laporan keuangan bank akan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan bank termasuk yang menunjukkan bahwa terdapat kesulitan keuangan sebagai deteksi tingkat resiko *financial distress* yang ditunjukkan melalui tingkat kredit yang mengalami kemacetan (nilai *non performing loan/NPL*).

Setelah mengetahui populasi, peneliti selanjutnya perlu menentukan sampel. Sampel merupakan sebagian populasi (Sugiyono, 2015:116). Sampel diperlukan mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Penulis dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana penentuan sampel penelitian dengan menggunakan kriteria-kriteria sesuai yang dikehendaki oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria-kriteria yang penulis gunakan untuk memilih sampel adalah:

- 1 Perusahaan perbankan yang sudah *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017.
- 2 Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2015-2017 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
- 3 Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2015-2017), baik data mengenai *good corporate governance* dan data yang diperlukan untuk mendeteksi *financial distress*.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penulis mengklasifikasikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi:

1. Variabel dependen: *Financial distress* (Y)
2. Variabel bebas (variabel independen):
  - a. Kepemilikan Institusional (X<sub>1</sub>)
  - b. Kepemilikan Manajerial (X<sub>2</sub>)
  - c. Jumlah Dewan Direksi (X<sub>3</sub>)
  - d. Dewan Komisaris Independen (X<sub>4</sub>)
  - e. Jumlah Komite Audit (X<sub>5</sub>).

Untuk memperjelas pemahaman mengenai variabel tersebut, penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional (X<sub>1</sub>)

Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan *blackholder* (individu atau atas nama perorangan di atas 5%, tetapi tidak termasuk kedalam golongan kepemilikan *insider*). Variabel kepemilikan institusional dihitung sebagai berikut (Brigham & Houston, 2014:228):

$$\text{INST} = \frac{\text{SI} + \text{SB}}{\text{TKS}}$$

Dimana:

INTS = *Institusional Ownership*

SI = Jumlah saham institusi (%)

SB = Jumlah saham *blackholder* (%)

TKS = Total keseluruhan saham (%)

2. Kepemilikan Manajerial (X<sub>2</sub>)

Kepemilikan Manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Brigham & Houston, 2014:211). Kepemilikan manajerial ini diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi.

3. Jumlah Dewan Direksi ( $X_3$ )

Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk mengawasi pekerjaan manajemen dalam mengelola perusahaan (Hamdani, 2016:86). Penulis menggunakan proksi dewan direksi dengan menggunakan variabel *dummy*. Dimana, perusahaan yang mempunyai jumlah dewan direksi yang kurang dari 7 orang (1-7 orang) diberi skala 1 (diduga optimal dalam mengontrol manajemen) dan lebih dari 7 orang diberi skala 0 (diduga tidak optimal dalam mengontrol manajemen).

4. Dewan Komisaris Independen ( $X_4$ )

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sedarmayanti, 2013:53).

Komisaris Independen diukur dengan persentase komisaris independen dibanding total dewan komisaris yang ada.

5. Jumlah Komite Audit ( $X_5$ )

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Hasnati, 2014:8). Komite Audit ditentukan apakah suatu perusahaan sudah memiliki komite audit. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah komite yang terdapat dalam perusahaan pada periode t (Fathonah, 2016).

6. *Financial distress* ( $Y$ )

*Financial distress* adalah kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan sebagai bentuk penurunan kinerja sebelum kebangkrutan benar-benar terjadi pada perusahaan (Fahmi, 2013:158). Variabel *financial distress*, dinyatakan dalam bentuk variabel *dummy*, pemberian skor pada variabel ini adalah 1 pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dan 0 untuk perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. *Financial distress* diukur dengan menggunakan *interest coverage ratio* (rasio antara biaya bunga

terhadap laba operasional). Perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari 1 dianggap sebagai perusahaan yang mengalami *financial distress*. *Interest coverage ratio* dihitung dengan rumus berikut (Fahmi, 2013:72):

$$\text{Interest coverage ratio} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Interest Expense}}$$

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian. Penulis dalam tahap ini menggunakan antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian).

#### 3.5.2 Regresi Logistik

Penulis menggunakan analisis inferensial menggunakan regresi logistik untuk menjawab hipotesis penelitian. Regresi logistik merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2013:336). Alasan penulis menggunakan analisis regresi logistik adalah karena variabel dependen dalam penelitian ini berupa variabel *dummy*. Regresi logistik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit terhadap *financial distress*.

Penulis menggunakan persamaan model regresi logistik untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$\text{Ln} \frac{P}{1-P} : \text{Dummy variabel } \textit{financial distress}$$

$X_1$  : Kepemilikan Institusional

$X_2$  : Kepemilikan Manajerial

$X_3$  : Jumlah Dewan Direksi

X<sub>4</sub> : Dewan Komisaris Independen

X<sub>5</sub> : Jumlah Komite Audit

### 3.5.3 Menilai Kelayakan Model Regresi

Tahap pertama dalam analisis regresi logistik adalah menilai kelayakan model regresi. Penilaian dapat dilakukan dengan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yaitu menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test Statistic* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness Fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2013:336).

### 3.5.4 Menilai Model Fit

Model regresi logistik dapat dikatakan baik atau fit dengan data apabila terjadi penurunan nilai -2LL awal (*initial -2LL fuction*) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (Ghozali, 2013:336). *Log Likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*sum of squareerror*" pada model regresi, sehingga penurunan *Log Likelihood* menunjukkan model regresi semakin baik.

Penilaian keseluruhan model menggunakan *-2 Log Likelihood* dimana output SPSS memberikan dua nilai yaitu pertama untuk model yang hanya memasukan konstanta dan *-2 Log Likelihood* yang kedua untuk model dengan variabel bebas, jika terjadi penurunan dalam nilai *-2 Log Likelihood* pada blok kedua jika dibandingkan dengan blok pertama maka dapat disimpulkan bahwa model kedua regresi menjadi lebih baik (Ghozali, 2013:336).

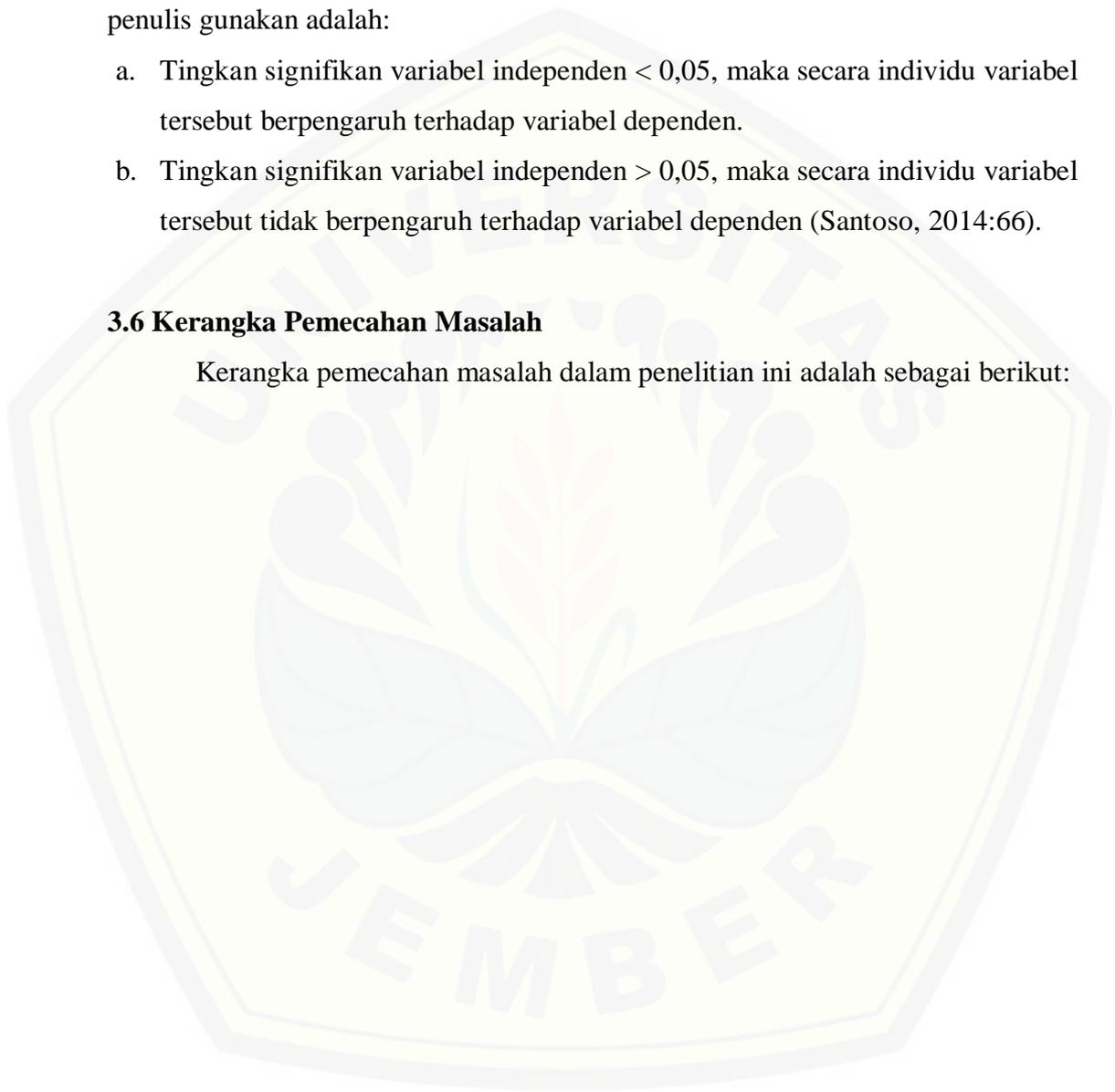
### 3.5.5 Uji Wald

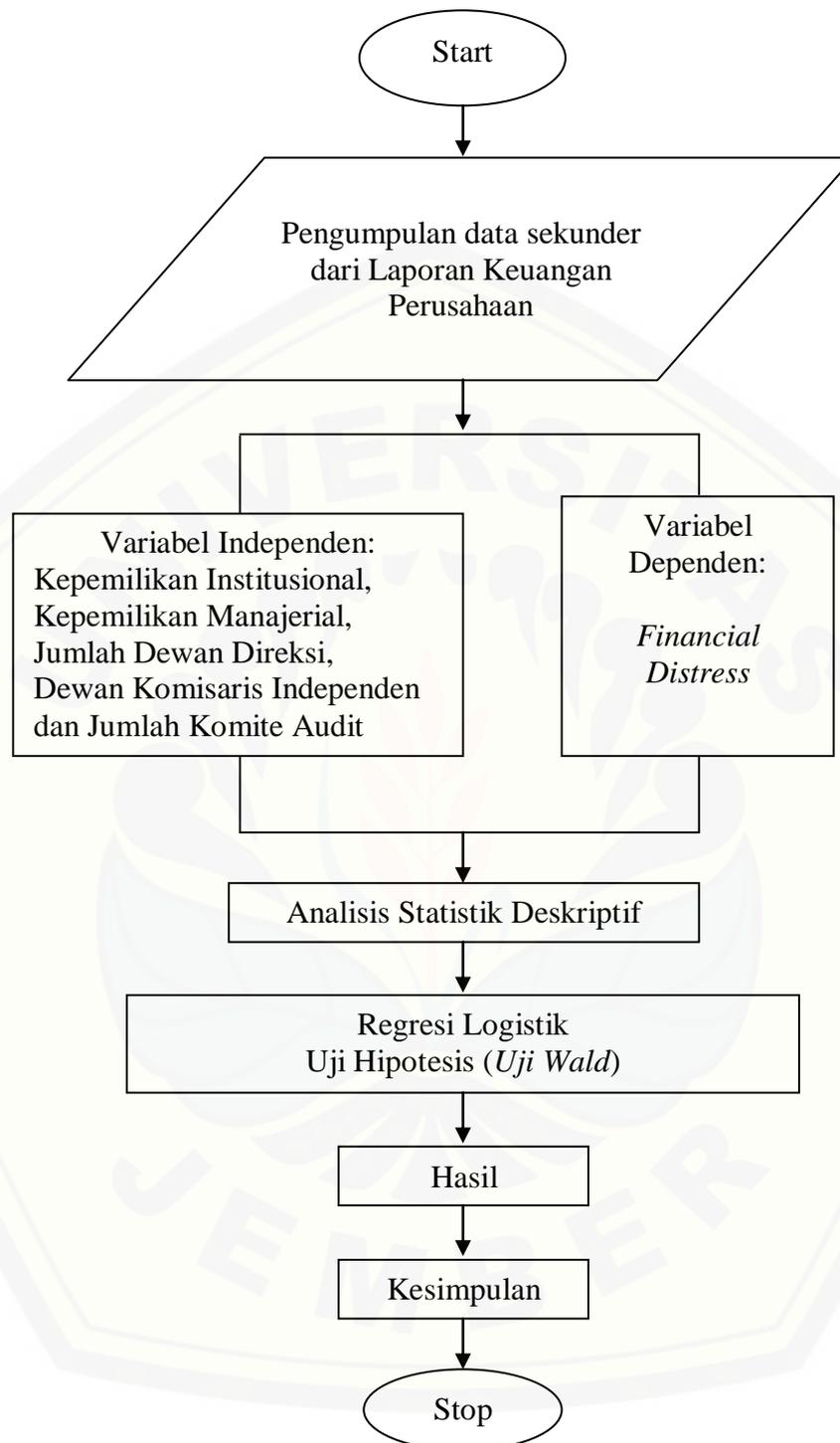
Uji Wald memiliki fungsi yang sama dengan uji t (pengaruh secara parsial) dalam analisis regresi linier. Pengujian pada tahap ini diperlukan penulis untuk pengujian signifikan koefisien secara sendiri-sendiri. Dasar keputusan yang penulis gunakan adalah:

- a. Tingkan signifikan variabel independen  $< 0,05$ , maka secara individu variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Tingkan signifikan variabel independen  $> 0,05$ , maka secara individu variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Santoso, 2014:66).

### 3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





**Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah**

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* terbukti kebenarannya ( $H_1$  diterima). Dalam hal ini, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* tidak terbukti kebenarannya ( $H_2$  ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan manajerial bukan suatu faktor yang dapat mempengaruhi *financial distress*.
3. Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* terbukti kebenarannya ( $H_3$  diterima). Dalam hal ini, semakin besar jumlah dewan direksi maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.
4. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga, hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress* tidak terbukti kebenarannya ( $H_4$  ditolak). Hal ini menunjukkan

bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen bukan suatu faktor yang dapat mempengaruhi *financial distress*.

5. Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga, hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* tidak terbukti kebenarannya ( $H_5$  ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah komite audit bukan suatu faktor yang dapat mempengaruhi *financial distress*.

## 5.2 Keterbatasan

Peneliti memiliki beberapa keterbatasan berkaitan dengan penelitian diantaranya:

1. Hanya meneliti proksi dari *Good Corporate Governace* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit, sementara masih banyak faktor yang mempengaruhi *financial distress*.
2. Adanya ketidaktepatan dalam penentuan objek penelitian yaitu perusahaan perbankan, yang dinilai tidak dapat menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governace* terhadap *financial distress*.

## 5.3 Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain seperti likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan lainnya, sehingga diperoleh temuan yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress*.
2. Kedepanya untuk penelitian selanjutnya tentang *financial distress* hendaknya tidak menggunakan objek perusahaan perbankan, karena dinilai tidak tepat dalam menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governace* terhadap *financial distress*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ananto, Rangga P., Rasyidah Mustika, dan Desi Handayani. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas* volume 19 No 1, Januari 2017.
- Anjana, Vika. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institutional Kepemilikan Publik, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. 2013. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Barus, Sabai Ita Br. dan Th. Diah Widiastuti. 2017. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Financial Distress pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. e-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Brigham, Eugene F. dan Joul F Houston. 2014. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daniri, Mas Achmad. 2014. *Lead By GCG*. Jakarta : Gagas Bisnis Indonesia.
- Fadhilah, Fauziah Nurul. dan Muchamad Syafruddin. 2013. Analisis Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Fathonah, Andina Nur. 2016. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Raslo Keuangan Terhadap financial Distress (Studi pada Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* Volume 2 No. 2, September 2016.
- Fathonah, Andina Nur. 2016. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Financial Distress pada Perusahaan Perbankan yang Mengalami

- Kredit Macet yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1, No. 2, Hal: 133-150 Desember 2016.
- Fuad, D. S. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* dan *Firm Size* terhadap Perusahaan yang Mengalami Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*). *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (3): 2337–3806.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etik dalam Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanggraeni, Dewi. 2016. Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*) dan *Good Corporate Governance: Pengujian Pentingnya Penerapan Enterprise Risk Management* terhadap Peningkatan Praktik GCG dan Kinerja Perusahaan. Jakarta. Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hanifah, Oktita Earning dan Agus Purwanto. 2013. Pengaruh Struktur *Corporate Governance* dan *Financial Indicators* terhadap Kondisi *Financial Distress*. *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013.
- Haq, Anna Quraisy., Brady Rikumahu. dan Anisah Firli. 2016. Pengaruh Karakteristik Praktik *Corporate Governance* terhadap Prediksi *Financial Distress* (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009 – 2014). *Jurnal Profit*, volume 3, nomor 1, mei 2016.
- Harahap, Lili Wardani. 2017. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan *Firm Size* Terhadap Kondisi *Financial Distress* pada Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar di Bei Tahun 2010-2014. *Jurnal riset akuntansi & bisnis* vol. 17 no. 2, september 2017.
- Hasnati. 2014. *Komisaris Independen & Komite Audit*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Helena, Savera. dan Muhammad Saifi. 2018. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 60 No. 2 Juli 2018.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Jensen, Michael C. & William H. Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour. Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics* 3:305-360.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusanti, O. & Andayani. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 10.
- Munawar, Irsyad., Anisah Firli, dan Aldilla Iradianty. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress (Studi pada Perusahaan Subsektor Tekstil & Garmen di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016). *e-Proceeding of Management* : Vol.5, No.2 Agustus 2018.
- Munawir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi 4*. Yogyakarta: Liberty.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/Pojk.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 170. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Pranoto. 2016. *Konsep Kepatuhan*. Yogyakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Radifan, Rusdan. dan Etna Nur Afri Yuyetta. 2015. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Halaman 1-11.
- Rahayu, Wiwin Putri dan Dani Sopian. 2017. Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan *Food and Beverage* di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 1, No 2.
- Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta: Sekretariat Negara.

Revina, Yeni Januarsi, dan Muhtar. 2015. Mekanisme Internal dan Eksternal Corporate Governance dalam Memitigasi Financial Distress pada Industri Transportasi di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.

Riadiani, Ajeng Rizka. dan Agus Wahyudin. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Financial Distress sebagai Intervening (Studi pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia). *Accounting Analysis Journal*. Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015.

Rodoni, Ahmad dan Herni Ali. 2014. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Multivariat*. Jakarta : PT Gramedia.

Sarwono, Sarlito W & Eko A. Meinarno. 2014. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sastriana, Dian. dan Fuad. 2013. Pengaruh Corporate Governance dan Firm Size terhadap Perusahaan yang Mengalami Kesulitan Keuangan (Financial Distress). *Diponegoro journal of accounting* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 2-10.

Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sutojo, Siswanto. dan E.John Aldridge. 2015. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: Damar Media Pustaka.

Taswan. 2015. *Akuntansi Perbankan*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: UPP STIM.

[www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)

Lampiran 1

Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Periode	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Hanifah dan Purwanto (2013) Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> dan <i>Financial Indicators</i> terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i>	2009-2011	Variabel Independen: ukuran dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit  Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: ukuran dewan komisaris, likuiditas, <i>leverage</i> , profitabilitas, dan <i>operating capacity</i>  Periode penelitian  Objek Penelitian	Ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>leverage</i> , dan <i>operating capacity</i> berpengaruh terhadap kondisi <i>financial distress</i> . Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kondisi <i>financial distress</i> .
2.	Sastriana dan Fuad (2013) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Firm Size</i> terhadap Perusahaan yang Mengalami Kesulitan Keuangan ( <i>Financial Distress</i> ).	2009-2012	Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, jumlah komite audit, proporsi komisaris independen.  Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: ukuran perusahaan ( <i>firm size</i> )  Periode penelitian  Objek Penelitian	jumlah dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kondisi <i>financial distress</i> , sedangkan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan ( <i>firm size</i> ) tidak berpengaruh terhadap kondisi <i>financial distress</i> .
3.	Fadhilah dan Syafruddin (2013) Analisis Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> terhadap Kemungkinan <i>Financial Distress</i> .	2010-2011	Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Proporsi Komisaris Independen  Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: Konsentrasi kepemilikan, Biaya Agensi Manajerial, Opini Audit, Kepemilikan Pemerintah  Periode penelitian  Objek Penelitian	Konsentrasi kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Biaya Agensi Manajerial, Opini Audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan <i>financial distress</i> . Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
4.	Kusanti dan Andayani (2015) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Rasio Keuangan terhadap <i>Financial distress</i>	2010-2013	Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, jumlah komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: jumlah dewan komisaris, likuiditas, <i>leverage</i> , <i>operating capacity</i> , dan profitabilitas  Periode penelitian  Objek Penelitian	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> dan <i>operating capacity</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> .
5.	Revina, dkk. (2015)	2008 –	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Komisaris independen, latar

	Mekanisme Internal dan Eksternal <i>Corporate Governance</i> dalam Memitigasi <i>Financial distress</i> pada Industri Transportasi di Indonesia	2012	komisaris independen  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	latar belakang pendidikan komite audit dan kualitas audit Variabel Kontrol: <i>debt equity ratio</i>  Periode penelitian  Objek Penelitian  Analisis Regresi Linier	belakang pendidikan komite audit, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>
6.	Radifan dan Yuyetta (2015) Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kemungkinan <i>Financial Distress</i> .	2013	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Audit, Jumlah Ahli Keuangan dalam Komite Audit, Ukuran Perusahaan  Periode penelitian  Objek Penelitian	Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Direksi, Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Audit, Jumlah Pertemuan Komite Audit, Jumlah Ahli Keuangan dalam Komite Audit, Ukuran Perusahaan, berpengaruh terhadap kemungkinan <i>financial distress</i> . Kepemilikan Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
7.	Riadiani dan Wahyudin (2015) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba dengan <i>Financial Distress</i> sebagai <i>Intervening</i> (Studi pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)	2011-2013	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajemen, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit	Variabel Dependen Manajemen Laba  Variabel Intervening <i>Financial Distress</i>  Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	<i>Good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Setelah dimediasi oleh <i>financial distress</i> . Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , tetapi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
8.	Fathonah (2016) Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Raslo Keuangan terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi pada Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	2010-2013	Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, komposisi dewan komisaris independen, jumlah komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	Variabel Independen: <i>current ratio</i> , <i>return on asset</i> , dan <i>current liabilities to total asset</i>  Periode penelitian  Objek Penelitian	Kepemilikan manajerial, <i>current ratio</i> , <i>return on asset</i> , dan <i>current liabilities to total asset</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komposisi dewan komisaris independen, jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
9.	Fathonah (2016)	2013	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Komposisi

	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Perbankan yang Mengalami Kredit Macet yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)		komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	jumlah dewan direksi  Periode penelitian	dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
Analisis regresi logistik					
10.	Haq dan Rikumahu (2016) Pengaruh Karakteristik Praktik <i>Corporate Governance</i> terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009 – 2014).	2009-2014	Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	Variabel Independen: jumlah dewan direksi  Periode penelitian  Objek Penelitian	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap prediksi <i>financial distress</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>financial distress</i> .
11.	Anjana (2017) Pengaruh Kepemilikan Institutional, Kepemilikan Publik, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris, Likuiditas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial Distress</i> .	2013-2015	Variabel Independen: kepemilikan institusional, Dewan direksi, Komite audit,  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: Kepemilikan publik, Dewan komisaris, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan  Periode penelitian  Objek Penelitian	Kepemilikan institutional, Kepemilikan publik, Dewan direksi, Komite audit, Dewan komisaris, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi <i>financial distress</i>
12.	Barus dan Widiastuti (2017) Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016.	2014-2016	Variabel Independen: kepemilikan manajerial, komisaris independen  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah, biaya agensi manajerial dan opini audit  Periode penelitian  Objek Penelitian	Komisaris independen, biaya agensi manajerial, dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Kepemilikan manajerial, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
13.	Rahayu dan Sopian (2017) Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial distress</i> (Studi	2013-2015	Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	Variabel Independen: likuiditas, <i>leverage</i> , pertumbuhan ( <i>sales growth</i> ), dan ukuran perusahaan	Likuiditas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . <i>Sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> .

	Empiris pada Perusahaan <i>Food and Beverage</i> di Bursa Efek Indonesia)			Periode penelitian	
				Objek Penelitian	
				Analisis Regresi Linier	
14.	Ananto dkk. (2017) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2011-2015	Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, jumlah komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	Variabel Independen: jumlah dewan komisaris, likuiditas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan.  Periode penelitian  Objek Penelitian	<i>Leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
15.	Harahap (2017) Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Dan <i>Firm Size</i> Terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan <i>Property And Real Estate</i> Yang Terdaftar di Bei Tahun 2010-2014.	2010-2014	Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	Variabel Independen: ukuran dewan komisaris, <i>firm size</i>  Periode penelitian  Objek Penelitian  Analisis Regresi Berganda	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan <i>firm size</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
16.	Helena dan Saifi (2018) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016).	2013-2016	Variabel Independen: Ukuran Dewan Direksi, kepemilikan institusional, Proporsi Komisaris Independen, dan komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>  Analisis regresi logistik	Variabel Independen: kepemilikan manajerial  Periode penelitian  Objek Penelitian	Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .
17.	Munawar dkk. (2018) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi pada Perusahaan Subsektor Tekstil & Garmen di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016).	2012-2016	Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit  Variabel Dependen: <i>financial distress</i>	Variabel Independen: jumlah dewan direksi  Periode penelitian  Objek Penelitian	Kepemilikan institusional dan manajerial, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>
18.	Sulistiawan (2018) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i>	2015-2017			Kepemilikan institusional dan jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . kepemilikan manajerial,

---

pada Perusahaan  
Perbankan di Bursa  
Efek Indonesia

dewan komisaris  
independen, dan komite  
audit tidak berpengaruh  
terhadap *financial distress*.

---

Sumber: Penelitian terdahulu, data diolah, Mei 2018



**Lampiran 2**

**Rekapitulasi Data Penelitian**

No.	Kode	Tahun	KOM IND	KOMISARIS	% KOM IND	DEW DIR	DUMMY DIR	KOM AUD
1	AGRO	2015	2	4	50.00	5	1	3
		2016	2	4	50.00	5	1	3
		2017	3	4	75.00	5	1	3
2	AGRS	2015	2	3	66.67	4	1	3
		2016	2	3	66.67	4	1	3
		2017	2	3	66.67	4	1	3
3	BABP	2015	2	3	66.67	5	1	4
		2016	2	3	66.67	5	1	4
		2017	2	3	66.67	4	1	4
4	BACA	2015	2	3	66.67	5	1	3
		2016	2	3	66.67	5	1	2
		2017	1	2	50.00	5	1	2
5	BBCA	2015	3	5	60.00	10	0	3
		2016	3	5	60.00	11	0	3
		2017	3	5	60.00	11	0	3
6	BBKP	2015	3	6	50.00	7	1	5
		2016	4	7	57.14	7	1	5
		2017	4	7	57.14	7	1	5
7	BBMD	2015	2	4	50.00	5	1	3
		2016	2	4	50.00	5	1	3
		2017	2	4	50.00	5	1	3
8	BBNI	2015	5	8	62.50	9	0	4
		2016	5	8	62.50	10	0	3
		2017	5	7	71.43	10	0	3
9	BBNP	2015	2	4	50.00	4	1	3
		2016	2	4	50.00	5	1	3
		2017	2	4	50.00	5	1	3
10	BBRI	2015	5	8	62.50	11	0	4
		2016	5	9	55.56	11	0	6
		2017	5	9	55.56	11	0	6
11	BBTN	2015	4	7	57.14	8	0	5
		2016	4	7	57.14	8	0	7
		2017	5	8	62.50	8	0	6
12	BCIC	2015	1	4	25.00	5	1	4
		2016	2	6	33.33	7	1	8
		2017	3	6	50.00	7	1	5
13	BDMN	2015	4	8	50.00	7	1	5
		2016	4	8	50.00	9	0	5
		2017	3	6	50.00	7	1	3
14	BEKS	2015	2	4	50.00	6	1	3
		2016	2	5	40.00	5	1	3

		2017	2	4	50.00	5	1	4
15	BINA	2015	2	3	66.67	3	1	4
		2016	2	3	66.67	4	1	4
		2017	2	3	66.67	4	1	4
16	BJBR	2015	3	4	75.00	7	1	5
		2016	4	5	80.00	7	1	5
		2017	4	5	80.00	7	1	4
17	BJTM	2015	2	5	40.00	5	1	3
		2016	2	5	40.00	5	1	3
		2017	2	5	40.00	7	1	4
18	BKSW	2015	4	7	57.14	7	1	3
		2016	3	6	50.00	6	1	3
		2017	4	6	66.67	6	1	3
19	BMAS	2015	2	3	66.67	4	1	5
		2016	2	3	66.67	4	1	4
		2017	2	3	66.67	4	1	4
20	BMRI	2015	4	8	50.00	11	0	5
		2016	5	8	62.50	10	0	6
		2017	4	8	50.00	10	0	6
21	BNBA	2015	2	3	66.67	4	1	3
		2016	2	3	66.67	4	1	3
		2017	2	3	66.67	4	1	3
22	BNGA	2015	4	8	50.00	11	0	8
		2016	4	9	44.44	11	0	8
		2017	4	9	44.44	11	0	8
23	BNII	2015	3	6	50.00	9	0	3
		2016	3	6	50.00	8	0	3
		2017	3	6	50.00	7	1	3
24	BNLI	2015	4	8	50.00	10	0	3
		2016	4	8	50.00	10	0	4
		2017	4	8	50.00	9	0	3
25	BSIM	2015	2	3	66.67	8	0	3
		2016	2	3	66.67	8	0	3
		2017	2	3	66.67	6	1	3
26	BSWD	2015	3	4	75.00	7	1	3
		2016	2	4	50.00	5	1	3
		2017	2	4	50.00	4	1	3
27	BTPN	2015	3	6	50.00	11	0	3
		2016	3	5	60.00	7	1	4
		2017	3	5	60.00	7	1	4
28	BVIC	2015	2	4	50.00	6	1	5
		2016	2	4	50.00	5	1	5
		2017	2	4	50.00	5	1	5
29	DNAR	2015	2	3	66.67	3	1	4
		2016	2	3	66.67	3	1	4
		2017	1	2	50.00	3	1	3

30	INPC	2015	3	6	50.00	7	1	6
		2016	3	5	60.00	6	1	6
		2017	3	6	50.00	8	0	5
31	MAYA	2015	2	5	40.00	8	0	3
		2016	2	5	40.00	9	0	3
		2017	3	6	50.00	8	0	3
32	MCOR	2015	2	3	66.67	5	1	3
		2016	2	3	66.67	8	0	3
		2017	2	4	50.00	6	1	4
33	MEGA	2015	2	4	50.00	10	0	3
		2016	2	4	50.00	8	0	3
		2017	2	5	40.00	7	1	3
34	NAGA	2015	2	3	66.67	3	1	3
		2016	2	3	66.67	3	1	3
		2017	2	3	66.67	3	1	3
35	NISP	2015	4	8	50.00	10	0	4
		2016	4	8	50.00	10	0	3
		2017	5	8	62.50	10	0	3
36	NOBU	2015	2	3	66.67	5	1	4
		2016	2	3	66.67	5	1	4
		2017	2	3	66.67	5	1	5
37	PNBN	2015	4	6	66.67	12	0	4
		2016	3	6	50.00	12	0	4
		2017	3	6	50.00	12	0	4
38	PNBS	2015	2	3	66.67	10	0	4
		2016	2	4	50.00	10	0	3
		2017	2	4	50.00	10	0	3
39	SDRA	2015	3	4	75.00	6	1	5
		2016	3	4	75.00	6	1	5
		2017	3	4	75.00	7	1	5

No.	Kode	Tahun	KEP INST	KEP MEN	JML SHM	% KI	% KM
1	AGRO	2015	10,013,470,929	0	11,479,715,698	87.228	0.00
		2016	14,453,776,056	0	15,325,711,820	94.311	0.00
		2017	16,623,058,801	0	17,912,537,958	92.801	0.00
2	AGRS	2015	4,785,347,612	0	5,232,739,042	91.450	0.00
		2016	4,785,347,612	0	5,256,176,644	91.042	0.00
		2017	4,785,347,612	0	5,256,176,644	91.042	0.00
3	BABP	2015	13,110,889,802	0	19,129,563,072	68.537	0.00
		2016	12,693,590,802	0	20,581,465,247	61.675	0.00
		2017	11,464,053,122	0	21,261,473,347	53.919	0.00
4	BACA	2015	2,915,135,000	509,948,497	6,404,528,162	45.517	7.96
		2016	2,349,480,000	883,013,531	7,037,943,495	33.383	12.55
		2017	2,349,480,000	883,013,531	7,039,500,962	33.376	12.54
5	BBCA	2015	11,625,990,000	59,780,620	24,655,010,000	47.155	0.24

		2016	11,625,990,000	49,462,668	24,655,010,000	47.155	0.20
		2017	13,545,990,000	47,701,585	24,655,010,000	54.942	0.19
6	BBKP	2015	5,408,431,307	1,951,388	9,086,620,432	59.521	0.02
		2016	5,408,431,307	1,951,388	9,086,620,432	59.521	0.02
		2017	5,408,431,307	1,951,388	9,086,620,432	59.521	0.02
7	BBMD	2015	3,658,020,000	2,070,000	4,090,090,000	89.436	0.05
		2016	3,658,020,000	2,070,000	4,090,090,000	89.436	0.05
		2017	2,839,995,000	2,070,000	4,090,090,000	69.436	0.05
8	BBNI	2015	18,049,741,820	538,040	18,648,656,458	96.788	0.00
		2016	18,049,741,820	538,040	18,648,656,458	96.788	0.00
		2017	18,301,103,412	492,257	18,648,656,458	98.136	0.00
9	BBNP	2015	554,743,223	0	676,833,882	81.962	0.00
		2016	583,581,223	0	676,833,882	86.222	0.00
		2017	583,581,223	0	676,833,882	86.222	0.00
10	BBRI	2015	13,999,999,999	1,304,500	24,669,162,000	56.751	0.01
		2016	13,999,999,999	1,443,500	24,669,162,000	56.751	0.01
		2017	69,999,999,999	3,937,500	123,345,810,000	56.751	0.00
11	BBTN	2015	6,353,999,999	5,496,150	10,582,345,000	60.043	0.05
		2016	6,353,999,999	473,500	10,590,000,000	60.000	0.00
		2017	6,353,999,999	162,500	10,590,000,000	60.000	0.00
12	BCIC	2015	901,184,100,000	0	901,212,450,117	99.997	0.00
		2016	901,184,100,000	0	901,212,450,117	99.997	0.00
		2017	1,001,184,100,000	0	1,001,212,450,117	99.997	0.00
13	BDMN	2015	9,545,657,789	16,585,576	9,584,643,365	99.593	0.17
		2016	9,546,906,919	15,336,446	9,584,643,365	99.606	0.16
		2017	7,575,069,933	3,962,031	9,584,643,365	79.033	0.04
14	BEKS	2015	9,882,982,616	21,041,500	10,755,117,153	91.891	0.20
		2016	44,922,317,813	0	64,109,430,357	70.071	0.00
		2017	36,842,847,715	0	64,109,430,357	57.469	0.00
15	BINA	2015	1,210,000,000	0	2,100,000,000	57.619	0.00
		2016	2,589,576,720	0	2,725,000,000	95.030	0.00
		2017	2,589,576,720	0	2,725,000,000	95.030	0.00
16	BJBR	2015	7,272,218,666	0	9,696,291,166	75.000	0.00
		2016	7,272,218,666	0	9,696,291,166	75.000	0.00
		2017	7,272,218,666	0	9,696,291,166	75.000	0.00
17	BJTM	2015	11,934,147,982	0	14,917,684,982	80.000	0.00
		2016	11,934,147,982	9,804,400	14,945,057,582	79.853	0.07
		2017	11,934,147,982	11,556,700	14,974,591,382	79.696	0.08
18	BKSW	2015	7,946,121,420	0	8,757,145,997	90.739	0.00
		2016	7,946,121,420	0	8,757,145,997	90.739	0.00
		2017	15,456,973,098	0	16,992,865,249	90.962	0.00
19	BMAS	2015	3,418,345,880	0	3,851,000,000	88.765	0.00
		2016	3,420,058,780	51,200	3,851,000,000	88.810	0.00
		2017	4,013,059,985	98,000	4,443,461,538	90.314	0.00
20	BMRI	2015	13,999,999,999	10,807,529	23,333,333,333	60.000	0.05
		2016	13,999,999,999	2,855,329	23,333,333,333	60.000	0.01

		2017	27,999,999,999	3,776,458	46,666,666,666	60.000	0.01
21	BNBA	2015	2,100,000,000	0	2,310,000,000	90.909	0.00
		2016	2,100,000,000	0	2,310,000,000	90.909	0.00
		2017	2,100,000,000	0	2,310,000,000	90.909	0.00
22	BNGA	2015	24,358,324,638	0	25,131,606,843	96.923	0.00
		2016	22,991,336,581	0	25,131,606,843	91.484	0.00
		2017	22,991,336,581	0	24,937,199,351	92.197	0.00
23	BNII	2015	65,909,370,963	0	67,746,840,730	97.288	0.00
		2016	65,909,370,964	0	67,746,840,730	97.288	0.00
		2017	65,909,370,964	0	67,746,840,730	97.288	0.00
24	BNLI	2015	10,590,763,612	0	11,856,954,739	89.321	0.00
		2016	19,909,138,662	0	22,313,049,821	89.226	0.00
		2017	24,991,429,332	0	28,015,858,971	89.205	0.00
25	BSIM	2015	7,861,971,522	5,720,175	14,151,999,729	55.554	0.04
		2016	8,941,161,979	5,263,396	15,251,704,336	58.624	0.03
		2017	9,049,201,846	1,228,946	15,381,803,066	58.831	0.01
26	BSWD	2015	979,089,442	16,800,000	1,041,600,000	93.999	1.61
		2016	979,089,442	16,800,000	1,041,600,000	93.999	1.61
		2017	1,305,452,589	22,400,000	1,373,563,147	95.041	1.63
27	BTPN	2015	4,051,983,001	37,567,100	5,840,287,257	69.380	0.64
		2016	4,051,983,001	37,325,000	5,745,088,357	70.530	0.65
		2017	3,562,575,227	68,325,000	5,745,088,357	62.011	1.19
28	BVIC	2015	5,635,239,348	882,000,000	7,890,653,827	71.417	11.18
		2016	5,635,239,348	0	7,890,653,827	71.417	0.00
		2017	6,147,478,029	0	8,671,048,162	70.897	0.00
29	DNAR	2015	0	237,943,059	2,250,000,000	0.000	10.58
		2016	0	237,943,059	2,250,000,000	0.000	10.58
		2017	0	237,943,059	2,250,000,000	0.000	10.58
30	INPC	2015	9,169,805,960	0	15,796,193,049	58.051	0.00
		2016	9,169,805,960	0	15,796,193,049	58.051	0.00
		2017	9,169,805,960	0	15,796,193,049	58.051	0.00
31	MAYA	2015	3,769,226,119	0	4,304,418,773	87.566	0.00
		2016	4,336,038,793	0	4,919,335,740	88.143	0.00
		2017	4,756,909,816	0	5,465,928,600	87.028	0.00
32	MCOR	2015	1,099,253,216	0	6,536,286,535	16.818	0.00
		2016	10,122,087,169	0	16,631,460,751	60.861	0.00
		2017	10,122,087,169	0	16,631,460,751	60.861	0.00
33	MEGA	2015	4,026,599,755	0	6,963,775,206	57.822	0.00
		2016	4,026,599,755	0	6,963,775,206	57.822	0.00
		2017	4,039,807,622	0	6,963,775,206	58.012	0.00
34	NAGA	2015	161,111,500	1,174,000,000	1,629,000,000	9.890	72.07
		2016	161,111,500	1,174,000,000	1,629,000,000	9.890	72.07
		2017	161,111,500	1,174,000,000	1,629,000,000	9.890	72.07
35	NISP	2015	9,760,695,612	1,596,649	11,472,648,486	85.078	0.01
		2016	9,760,695,612	1,709,181	11,472,648,486	85.078	0.01
		2017	9,760,695,612	1,709,181	11,472,648,486	85.078	0.01

36	NOBU	2015	3,233,500,000	0	4,311,330,000	75.000	0.00
		2016	3,360,082,300	0	4,437,912,300	75.713	0.00
		2017	3,360,082,300	0	4,437,912,301	75.713	0.00
37	PNBN	2015	20,438,864,437	0	24,087,645,998	84.852	0.00
		2016	20,438,864,437	0	24,087,645,998	84.852	0.00
		2017	20,438,864,437	0	24,087,645,998	84.852	0.00
38	PNBS	2015	9,019,951,790	0	9,872,717,000	91.362	0.00
		2016	9,019,951,790	0	9,919,525,410	90.931	0.00
		2017	8,455,778,690	0	10,195,335,256	82.938	0.00
39	SDRA	2015	4,061,983,762	11,868,510	5,072,356,660	80.081	0.23
		2016	4,061,983,762	9,361,010	5,072,356,660	80.081	0.18
		2017	5,563,972,614	6,824,975	6,580,926,254	84.547	0.10

No.	Kode	Tahun	BUNGA	LABA OP	FIN DISS	DUMMY FD
1	AGRO	2015	431	95	0.2204	1
		2016	558	129	0.2312	1
		2017	749	176	0.2350	1
2	AGRS	2015	285	6.4	0.0225	1
		2016	243	6.2	0.0255	1
		2017	232	-7.3	-0.0315	1
3	BABP	2015	663	11	0.0166	1
		2016	694	53	0.0764	1
		2017	677	-917	-1.3545	1
4	BACA	2015	829	123	0.1484	1
		2016	878	133	0.1515	1
		2017	923	123	0.1333	1
5	BBCA	2015	11213	22657	2.0206	0
		2016	10347	25839	2.4972	0
		2017	11941	29159	2.4419	0
6	BBKP	2015	5056	1173	0.2320	1
		2016	5432	476	0.0876	1
		2017	6113	122	0.0200	1
7	BBMD	2015	323	227	0.7028	1
		2016	335	239	0.7134	1
		2017	302	353	1.1689	0
8	BBNI	2015	11335	11412	1.0068	0
		2016	12919	14229	1.1014	0
		2017	15272	17223	1.1278	0
9	BBNP	2015	559	87	0.1556	1
		2016	420	16	0.0381	1
		2017	368	-66	-0.1793	1
10	BBRI	2015	27154	31959	1.1770	0
		2016	28577	33965	1.1885	0
		2017	29894	36806	1.2312	0

11	BBTN	2015	8155	2534	0.3107	1
		2016	8975	3352	0.3735	1
		2017	9931	3892	0.3919	1
12	BCIC	2015	922	-647	-0.7017	1
		2016	957	471	0.4922	1
		2017	1017	113	0.1111	1
13	BDMN	2015	8772	3281	0.3740	1
		2016	6876	4393	0.6389	1
		2017	5903	5367	0.9092	1
14	BEKS	2015	632	467	0.7389	1
		2016	395	-510	-1.2911	1
		2017	344	-103	-0.2994	1
15	BINA	2015	149	21	0.1409	1
		2016	138	23	0.1667	1
		2017	123	24	0.1951	1
16	BJBR	2015	5108	1811	0.3545	1
		2016	4599	1520	0.3305	1
		2017	5195	1701	0.3274	1
17	BJTM	2015	1580	1197	0.7576	1
		2016	1446	1452	1.0041	0
		2017	1405	1643	1.1694	0
18	BKSW	2015	1351	205	0.1517	1
		2016	1532	-863	-0.5633	1
		2017	1394	-948	-0.6801	1
19	BMAS	2015	317	56	0.1767	1
		2016	292	92	0.3151	1
		2017	267	92	0.3446	1
20	BMRI	2015	26207	26339	1.0050	0
		2016	24884	18613	0.7480	1
		2017	27174	27170	0.9999	1
21	BNBA	2015	391	81	0.2072	1
		2016	385	105	0.2727	1
		2017	332	121	0.3645	1
22	BNGA	2015	10932	692	0.0633	1
		2016	9231	2754	0.2983	1
		2017	8000	4107	0.5134	1
23	BNII	2015	7417	1458	0.1966	1
		2016	7433	2589	0.3483	1
		2017	7101	2504	0.3526	1
24	BNLI	2015	9285	294	0.0317	1
		2016	7919	-8634	-1.0903	1
		2017	5424	951	0.1753	1
25	BSIM	2015	899	239	0.2659	1
		2016	976	494	0.5061	1
		2017	1035	407	0.3932	1
26	BSWD	2015	552	-48	-0.0870	1

		2016	407	-574	-1.4103	1
		2017	298	-45	-0.1510	1
27	BTPN	2015	5308	2433	0.4584	1
		2016	4544	2605	0.5733	1
		2017	4173	1937	0.4642	1
28	BVIC	2015	1657	93	0.0561	1
		2016	1857	100	0.0539	1
		2017	1835	138	0.0752	1
29	DNAR	2015	120	16	0.1333	1
		2016	122	18	0.1475	1
		2017	124	12	0.0968	1
30	INPC	2015	1412	93	0.0659	1
		2016	1263	101	0.0800	1
		2017	1214	103	0.0848	1
31	MAYA	2015	3306	878	0.2656	1
		2016	3611	1039	0.2877	1
		2017	4384	903	0.2060	1
32	MCOR	2015	625	92	0.1472	1
		2016	590	76	0.1288	1
		2017	572	74	0.1294	1
33	MEGA	2015	3155	1239	0.3927	1
		2016	2664	1545	0.5800	1
		2017	2885	1649	0.5716	1
34	NAGA	2015	179	15	0.0838	1
		2016	171	16	0.0936	1
		2017	171	9	0.0526	1
35	NISP	2015	4802	2000	0.4165	1
		2016	4696	2342	0.4987	1
		2017	4901	2878	0.5872	1
36	NOBU	2015	289	22	0.0761	1
		2016	270	39	0.1444	1
		2017	273	46	0.1685	1
37	PNBN	2015	9714	2425	0.2496	1
		2016	9004	3207	0.3562	1
		2017	8832	2899	0.3282	1
38	PNBS	2015	4802	2000	0.4165	1
		2016	4696	2342	0.4987	1
		2017	4091	2877	0.7033	1
39	SDRA	2015	779	365	0.4685	1
		2016	868	414	0.4770	1
		2017	904	588	0.6504	1

**Lampiran 3**

**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

**Semua Perusahaan**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	117	.000	99.997	73.13323	23.275678
X2	117	.000	72.070	2.57974	11.616342
X4	117	25.00	80.00	57.0012	10.38248
X5	117	2.00	8.00	3.9231	1.26050
Valid N (listwise)	117				

**Frequency Table**

**Y**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NON FD	13	11.1	11.1	11.1
	FD	104	88.9	88.9	100.0
	Total	117	100.0	100.0	

**X3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 7	43	36.8	36.8	36.8
	<= 7	74	63.2	63.2	100.0
	Total	117	100.0	100.0	

**Perusahaan yang Mengalami *Financial Distress***

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	104	.000	99.997	73.61910	23.794199
X2	104	.000	72.070	2.89356	12.291250
X4	104	25.00	80.00	57.3127	10.63391
X5	104	2.00	8.00	3.9327	1.27914
Valid N (listwise)	104				

**Y**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid FD	104	100.0	100.0	100.0

**X3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid > 7	33	31.7	31.7	31.7
<= 7	71	68.3	68.3	100.0
Total	104	100.0	100.0	

**Perusahaan yang Tidak Mengalami *Financial Distress***

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	13	47.155	98.136	69.24631	18.947285
X2	13	.000	.240	.06923	.085582
X4	13	40.00	62.50	54.5092	7.99086
X5	13	3.00	6.00	3.8462	1.14354
Valid N (listwise)	13				

**Y**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NON FD	13	100.0	100.0	100.0

**X3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid > 7	10	76.9	76.9	76.9
<= 7	3	23.1	23.1	100.0
Total	13	100.0	100.0	

**Lampiran 4**

**Hasil Analisis Regresi Logistik**

**Logistic Regression**

**Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	117	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	117	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		117	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

**Dependent Variable Encoding**

Original Value	Internal Value
NON FD	0
FD	1

**Block 0: Beginning Block**

**Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 1	85.257	1.556
0 2	81.712	1.995
3	81.627	2.077
4	81.627	2.079
5	81.627	2.079

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 81.627

c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table<sup>a,b</sup>

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Y		
			NON FD	FD	
Step 0	Y	NON FD	0	13	.0
		FD	0	104	100.0
		Overall Percentage			88.9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	2.079	.294	49.967	1	.000	8.000

Variables not in the Equation

Step	Variables	Score	df	Sig.
0	X1	.411	1	.521
	X2	.689	1	.407
	X3	10.153	1	.001
	X4	.850	1	.357
	X5	.055	1	.815
	Overall Statistics	12.856	5	.025

**Block 1: Method = Enter**

Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients					
			Constant	X1	X2	X3	X4	X5
Step 1	1	78.120	-.209	.009	.013	.759	.006	.076
	2	69.727	-1.575	.018	.031	1.439	.015	.146
	3	67.970	-2.894	.026	.063	1.826	.026	.187
	4	66.963	-3.936	.033	.159	1.828	.033	.215
	5	66.381	-4.622	.039	.294	1.749	.037	.233
	6	66.231	-4.680	.039	.383	1.752	.037	.235
	7	66.194	-4.690	.039	.451	1.752	.037	.236
	8	66.189	-4.694	.039	.488	1.752	.037	.236
	9	66.189	-4.695	.039	.496	1.752	.037	.236
	10	66.189	-4.695	.039	.497	1.752	.037	.236

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 81.627
- d. Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than .001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	15.438	5	.009
	Block	15.438	5	.009
	Model	15.438	5	.009

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	66.189 <sup>a</sup>	.124	.246

- a. Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	13.903	8	.072

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

		Y = NON FD		Y = FD		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	5	4.430	7	7.570	12
	2	2	3.024	10	8.976	12
	3	0	2.168	12	9.832	12
	4	5	1.208	7	10.792	12
	5	1	.817	11	11.183	12
	6	0	.576	12	11.424	12
	7	0	.395	13	12.605	13
	8	0	.227	12	11.773	12
	9	0	.151	13	12.849	13
	10	0	.004	7	6.996	7

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed	Y	Predicted		Percentage Correct	
		Y			
		NON FD	FD		
Step 1	Y	NON FD	0	13	.0
		FD	0	104	100.0
Overall Percentage					88.9

a. The cut value is .500

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	X1	.039	.020	4.012	1	.045	1.040
	X2	.497	.682	.530	1	.466	1.643
	X3	1.752	.715	5.998	1	.014	5.765
	X4	.037	.040	.835	1	.361	1.038
	X5	.236	.257	.845	1	.358	1.267
	Constant		-4.695	3.308	2.015	1	.156

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5.

**Correlation Matrix**

		Constant	X1	X2	X3	X4	X5
Step 1	Constant	1.000	-.723	-.130	-.114	-.842	-.386
	X1	-.723	1.000	.170	.051	.388	.124
	X2	-.130	.170	1.000	-.062	.034	.081
	X3	-.114	.051	-.062	1.000	.013	.081
	X4	-.842	.388	.034	.013	1.000	.037
	X5	-.386	.124	.081	.081	.037	1.000

**Casewise List<sup>b</sup>**

Case	Selected Status <sup>a</sup>	Observed	Predicted	Predicted Group	Temporary Variable	
		Y			Resid	ZResid
21	S	N**	.915	F	-.915	-3.273
22	S	N**	.914	F	-.914	-3.270
23	S	N**	.894	F	-.894	-2.906
50	S	N**	.918	F	-.918	-3.356
51	S	N**	.934	F	-.934	-3.775

a. S = Selected, U = Unselected cases, and \*\* = Misclassified cases.

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are listed.